

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Wawasan
Media Online	.....

Wilayah: BPK Jawa Tengah

Halaman 9

## Dorong Perbaikan Tata Kelola Aset dan Keuangan Daerah

SEMARANG - Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) menilai secara umum, sistem tata kelola aset daerah atau manajemen aset daerah di Jawa Tengah sudah cukup bagus.

"Kami mengambil sampel dan melaksanakan kunjungan kerja di Jateng karena menilai seperti itu. Sekalipun memang opini ini belum menjadi tolak ukur utama tidak adanya korupsi tetapi pada dasarnya pengelolaan keuangan daerah baik di Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jateng dari hasil diskusi tadi sudah kelihatan bagus," papar Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman, disela kunjungan kerja bersama di

kantor BPK Jateng, Semarang, Senin (23/9)

Sekalipun memang diakui, persoalan cukup klasik terkadang susah ditangani karena adanya perubahan-perubahan, aturan, organisasi perangkat daerah dan lain sebagainya.

Dipaparkan, kunker tersebut untuk menindaklanjuti Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

"Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan yang komprehensif, terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Daerah, serta permasalahan-permasalahan

yang dihadapi oleh daerah, kita lakukan kunker," lanjutnya.

Abdul Gafar menandaskan, dari kunker tersebut diharapkan BPK, khususnya wilayah Jateng untuk terus meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, sehingga tata kelola keuangan di daerah juga terus mengalami perbaikan. "Harapannya, pembangunan dapat berjalan dengan baik, sekaligus meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tandasnya.

Ditandaskan, secara teori capaian Wajar Tanpa Pengecualina (WTP) Jateng bagus, namun ada sejumlah obyek pemeriksaan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. "Mudah-mudahan ini bisa

segera diselesaikan," ungkap Abdul Gafar.

Sementara, anggota DPD RI asal Jateng Bambang Sadono menuturkan sudah banyak birokrasi pemerintah yang meraih predikat WTP.

"Ini artinya sudah ada kesiapan, terutama dalam menyerap investasi. Harapannya, tujuan pertumbuhan ekonomi di Jateng yang ditargetkan mencapai 7 persen, mudah-mudahan bisa tercapai. Tidak hanya sekedar pembukuan yang rapi tidak ada masalah," tandasnya.

Pihaknya juga mendorong Pemda yang ingin mempertahankan predikat WTP, atau meningkat dari WDP ke WTP, untuk menyelesaikan dahulu rekomendasi dari BPK RI Kan-

tor Perwakilan Jateng. Diterangkan, akan semakin baik

jika banyak yang selesai. ■ Rix-jie